



Jam Kerja Akan Diperpanjang

■ Aturan WFH ASN Sehari dalam Seminggu Masih Disusun

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah berencana menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS) maupun karyawan swasta setelah periode-covid berakhir 2026 berakhir.

Fluktuasinya, harga minyak dunia akibat eskalasi di Selat Hormuz melatartbolakangi pemberlakuan WFH yang bertujuan mendukung ketahanan energi nasional.

Agar kerja tetap efektif, rencana saya Jumat WFH dan hari-hari biasa jam kantor saya perpanjang sampai sore untuk menutup kekurangan satu hari WFH.

Tidak Signifikan Menghemat BBM

PENGAMAT Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi meyakini bahwa menyetrika harga minyak dunia imbas perang di Timur Tengah memang berdampak signifikan bagi ekonomi Indonesia.

Saatnya Kembali ke Perantauan

KULON PROGO, TRIBUN - Selasa (24/3) kemarin menjadi hari terakhir dari masa libur Lebaran 2026. Para pemudik pun mulai melaksanakan perjalanan untuk kembali ke perantauan melewati jalur-jalur utama, termasuk di wilayah Kulon Progo.

Seperti yang terlihat di Jalan Nasional wilayah Kabupaten Sertolo, Kulon Progo pada Selasa siang, Antrean panjang kendaraan tampak merambat dari arah barat, persisnya depan Pasar Sertolo baru menuju Simpang Ngelo di timur.

Antrean dikawatirkan akan kendaraan berhenti dan berpotensi AKAP (Akar, Rata, Antar, Permisal). Antrean panjang membuat sejumlah anggota polisi turun ke jalan untuk melakukan penertaman.

Seperti Pos Pengamatan (Pos Tani) Pasar Sertolo Baru, Ipta M. Tutehul mengatakan antrean panjang kendaraan terjadi karena sudah mulai banyak pemudik yang hendak pulang ke perantauan atau tempat tinggal.

PASTIKAN PELAYANAN MASYARAKAT TERJAGA

- Pemerintah daerah merespons rencana pemerintah pusat menetapkan kebijakan WFH bagi PNS maupun karyawan swasta satu hari dalam satu pekan.
- Pemkot Yogyakarta mulai menyiapkan rencana agar pelayanan tersebut tidak akan mengganggu kinerja aparat maupun pelayanan kepada masyarakat.
- Rencananya, Pemkot Yogyakarta menetapkan hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan WFH, namun jam kantor di hari-hari biasa akan dipertajam sampai sore.
- Sementara itu, Pemkab Sleman berencana melakukan pengujian, karena tidak semua pelayanan masyarakat bisa dilakukan jarak jauh.
- ASN di Pemkab Sleman yang akan melakukan WFH harus memastikan pendataan dan keaja organisasi perangi di daerah (OPD).
- Selain itu, penerapan WFH di lingkungan Pemkab Sleman hanya pada pelayanan esensial yang bisa dilakukan di luar kantor.

Jam Kerja

• Sambutan ke-1

Alas rencana ini. Pembek Yogyakarta mulai menyiapkan skema Wali Kota Yogyakarta. Hasto Wicaksono, Himmam Wajar Isenyo menegaskan tidak akan mengganggu kerja aparat maupun pelayanan kepada masyarakat.

Menanggapi hal ini, meski belum final tapi pihaknya telah merancang pola kerja yang menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Salah satunya dengan menetapkan hari di mana sebagai waktu pelaksanaan WPH bagi ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

"Agar kerja tetap efektif, rencana saya Jumat WPH dan hari-hari biasa jam kantor saya perpanjang sampai sore untuk menutupi kekurangan satu hari WPH," ujarnya via pesan singkat, Minggu (22/3).

Menurutnya, langkah ini diambil agar produktivitas tetap terjaga sekaligus memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Berpersamaan jam kerja dinilai menjadi solusi agar target kinerja tetap tercapai meski ada pengurangan hari kerja di kantor.

Sketaris Daerah Sieman, Susmiarto mengatakan, Pemkot Sieman siap menanggapi arahan dari pemerintah pusat. Pihaknya pun masih menunggu petunjuk teknis terkait kebijakan tersebut.

"Kami siap WPH untuk ASN, belum ada jukdisnya kalau di daerah. Nah nanti di daerah, kita akan lihat situasi kebutuhan masyarakat," katanya, Minggu (22/3).

Di menanggapi, Penkab Sieman akan melakukan penyesuaian, sehingga tidak akan sama persis dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal itu karena Pemkab Sieman langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, tidak semua pelayanan bisa dilakukan jarak jauh. Ada beberapa pelayanan yang membutuhkan kehadiran atau tatap muka. "Tentu kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena kalau di daerah itu kan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sehingga nanti pelayanan masyarakat tidak terganggu," terangnya.

Susmiarto mencontohkan skema WPH pada libur Idulfitri. Ia menyebut ada ASN yang melakukan WPH, namun harus mendapatkan persetujuan dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di luar kantor.

Kebijakan WPH saat Idulfitri diserahkan pada OPD, sebab masing-masing OPD yang mengetahui persis karakter kerja di instansinya.

"Misalnya administrasi keuangan, itu kan bisa dilakukan di rumah. Karena nanti output kerjanya dilaporkan pimpingannya. Sehingga WPH itu benar-benar bekerja, ada output kerja, produk kerja yang dihasilkan. Kami mengantisipasi agar tidak disalahgunakan," ujarnya.

"Tentu akan ada pengawasan, kami serahkan ke OPD, yang tahu persis ka-

rakter kerja di instansinya. Namun, untuk saat ini kami masih menunggu jukdis nanti pasti ada surat edaran juga. Dan kami memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu," imbuhnya.

Hasto Wicaksono, Himmam Wajar Isenyo menegaskan Pemkab Klaten pada prinsipnya siap menanggapi arahan dari pemerintah pusat terkait rencana kebijakan WPH.

"Prinsipnya kami pendua mengikuti arahan pusat. Sepanjang nanti benar-benar ada instruksi semacam itu, kami siap menanggapi," ujar Himmam, Minggu (22/3).

Meski demikian, Himmam mengemukakan agar kebijakan tersebut tidak dibelakangi secara sepihak, khususnya bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Ia menilai, jika OPD pelayanan publik tetap dipaksa menjalankan WPH, dampaknya bisa signifikan terhadap kualitas layanan. Menurutnya, sejumlah OPD yang sebaiknya mendapat pengecualian antara lain sektor kesehatan seperti Dinas Kesehatan yang berada di poskestas, serta dinas yang menagungi layanan perikanan seperti DPMPTSP.

"OPD yang menjadi pelayanan masyarakat harus ada pengecualian karena dampaknya akan luar biasa," tegasnya.

Minim dampak
Presiden Koroforeasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai wacana kebijakan WPH bagi ASN ditanggapi ulang secara mendalam. Ia menanggapi kebijakan WPH tersebut minim dampak terhadap etisitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kebijakan WPH juga dinilai berpotensi mengganggu pelayanan publik yang erat kaitannya dengan kepentingan pekerja dan dunia usaha. Sektor pelayanan publik, terutama di bidang ketenagakerjaan, sangat bergantung pada interaksi secara langsung.

Kebijakan WPH juga dipandang bertentangan dengan proses penyelesaian berbagai permasalahan yang membutuhkan kehadiran fisik. Salah satu yang pasti terdampak adalah pelayanan publik.

"Dalam sektor ketenagakerjaan, misalnya, akan terganggu pelayanan melalui perselisihan PHK (pemutusan hubungan kerja), THR (tunjangan hari raya), dan upah. Begitu juga dengan pengawasan terhadap pelaksanaan syarat dan norma kerja di perusahaan," kata Iqbal lewat keterangan resmi, dilansir Senin (23/3).

"Seman ini tidak bisa dilakukan secara WPH tetap harus tatap muka," tambah dia. Di sisi lain, kebijakan WPH dinilai tidak relevan kalau ditinjau dari kebutuhan operasional sektor industri dan manufaktur. Apalagi, kegiatan produksi di pabrik tidak memungkinkan penerapan pola kerja jarak jauh.

Sektor swasta, secara khusus industri, tetap harus beroperasi setiap hari tanpa henti sehingga kebijakan WPH bagi ASN justru berpotensi menimbulkan hambatan administratif yang berdampak pada dunia usaha.

"Jika pelayanan pemerintah ikut terganggu maka akan berdampak pada proses perteman, termasuk ekspor-impor dan izin tenaga kerja asing," ucap dia.

Menurut Iqbal, alasan penghematan BBM tidak cukup kuat untuk menjadi dasar kebijakan WPH, mengingat dampaknya yang sangat terbatas. Selain itu, manfaatnya sangat kecil terhadap penghematan anggaran dan BBM. Kalau pemerintah serius ingin melakukan penghematan, seharusnya fokus pada pengurangan anggaran proyek-proyek mencusar yang tidak berdampak langsung bagi rakyat," jelas dia.

Dalam menelaah kebijakan, Iqbal mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Khususnya, dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Ia minta pemerintah agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa kajian yang komprehensif.

"Kebijakan yang tampak praktis belum tentu menjawab persoalan yang ada. Jangan sampai niat elitis-elitis justru menimbulkan masalah baru bagi pelayanan publik dan dunia kerja," tutur Iqbal.

Harus terukur
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Ujang Bey mengemukakan pemerintah agar wacana kebijakan WPH tidak mengganggu kinerja perusahaan. Ujang mengkritik langkah pemerintah yang mendorong kebijakan WPH sebagai upaya efisiensi energi, namun penerapannya harus dirangsang secara matang dan terukur.

"Untuk swasta saya kira pemerintah harus hati-hati menerapkan program WPH. Karena kan swasta ini memiliki target-target tertentu bagi perusahaan dan setiap karyawan dibebankan juga kewajiban kerjanya. Jangan sampai penerapan WPH bagi swasta mengganggu stabilitas kinerja perusahaan," kata Ujang, kepada wartawan, Senin (23/3).

Menurut dia, pemerintah perlu menentukan secara jelas jumlah ASN maupun pekerja swasta yang akan terdampak. Termasuk durasi pelaksanaan kebijakan tersebut. "Target berapa jumlah ASN maupun swasta yang akan terdampak WPH dan dalam rentang waktu berapa lama?" instansi dan Kementerian mana saja yang terdampak swasta apa saja?" tanya dia.

Dari situ, menurut dia, pemerintah bisa menghitung berapa besar penghematan BBM yang didapat. Ia menilai, penerapan WPH di sektor swasta tidak bisa disamakan dengan ASN. Berapa target penggunaan memiliki target dan belum tentu yang harus dicapai oleh setiap karyawan.

Karena itu, Ujang menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan. Selain itu, ia juga mengingatkan agar kebijakan WPH tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah diminta memastikan ASN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar tetap dapat memberikan layanan secara optimal. "Tetapi juga ASN yang bersentuhan langsung pelayannya dengan masyarakat, jangan sampai kebijakan tersebut memukul kesehatan-kesehatan di masyarakat karena pelayanan tidak maksimal," ujar dia.

Ujang menilai, efektivitas kebijakan WPH sangat bergantung pada perencanaan yang matang serta implementasi yang sesuai dengan target.

Demai efisien
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hartono mengatakan, aturan teknis pelaksanaan WPH masih disusun. Namun, kebijakan tersebut dipaparkan mulai diberlakukan usai Lebaran.

"WPH akan ditetapkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berdiskusi," ujar Hartono di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3).

Ia memastikan, kebijakan tersebut akan berlaku bagi ASN dan didorong pula untuk diterapkan bagi pekerja sektor swasta dengan pengecualian pada layanan publik tetap harus berjalan normal.

Pelaksanaan WPH juga akan dikordinasikan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Berlaku untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik. (Koordinasi nanti) ada Kemaker dan Mendagri," ucap dia.

Pemerintah menetapkan kebijakan fleksibilitas kerja tersebut sebagai respons atas kondisi gangguan pasokan dan tingginya harga minyak global imbas perang di Timur Tengah. Harapannya, bisa mengurangi pemborosan energi.

Menarik Ketugan (Menteri Paripurna Tuti Sudewa) mengaku pemerintahan telah memiliki perhitungan kasar terkait potensi penghematan penggunaan BBM dari penerapan kebijakan WPH satu hari dalam sepekan.

Penghematan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 persen, meski angka tersebut masih bersifat estimasi awal. "Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung. (hitungannya) kasual, sepektumnya, kira-kira 20 persen," ungkap Bendahara Negara itu.

Kebijakan WPH hanya diterapkan satu hari dalam sepekan karena mempertimbangan efektivitas kerja. Ia menekankan, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal jika diterapkan WPH terlalu lama.

"WPH itu bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WPH," kata dia. (Koposurmanaw)

kanan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan. Selain itu, ia juga mengingatkan agar kebijakan WPH tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah diminta memastikan ASN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar tetap dapat memberikan layanan secara optimal. "Tetapi juga ASN yang bersentuhan langsung pelayannya dengan masyarakat, jangan sampai kebijakan tersebut memukul kesehatan-kesehatan di masyarakat karena pelayanan tidak maksimal," ujar dia.

Ujang menilai, efektivitas kebijakan WPH sangat bergantung pada perencanaan yang matang serta implementasi yang sesuai dengan target.

Demai efisien
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hartono mengatakan, aturan teknis pelaksanaan WPH masih disusun. Namun, kebijakan tersebut dipaparkan mulai diberlakukan usai Lebaran.

"WPH akan ditetapkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berdiskusi," ujar Hartono di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3).

Ia memastikan, kebijakan tersebut akan berlaku bagi ASN dan didorong pula untuk diterapkan bagi pekerja sektor swasta dengan pengecualian pada layanan publik tetap harus berjalan normal.

Pelaksanaan WPH juga akan dikordinasikan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Berlaku untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik. (Koordinasi nanti) ada Kemaker dan Mendagri," ucap dia.

Pemerintah menetapkan kebijakan fleksibilitas kerja tersebut sebagai respons atas kondisi gangguan pasokan dan tingginya harga minyak global imbas perang di Timur Tengah. Harapannya, bisa mengurangi pemborosan energi.

Menarik Ketugan (Menteri Paripurna Tuti Sudewa) mengaku pemerintahan telah memiliki perhitungan kasar terkait potensi penghematan penggunaan BBM dari penerapan kebijakan WPH satu hari dalam sepekan.

Penghematan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 persen, meski angka tersebut masih bersifat estimasi awal. "Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung. (hitungannya) kasual, sepektumnya, kira-kira 20 persen," ungkap Bendahara Negara itu.

Kebijakan WPH hanya diterapkan satu hari dalam sepekan karena mempertimbangan efektivitas kerja. Ia menekankan, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal jika diterapkan WPH terlalu lama.

"WPH itu bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WPH," kata dia. (Koposurmanaw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005